

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat untuk bisa memilih maupun dipilih dalam suatu pemungutan suara (*election*). Akan tetapi, demokrasi elektoral di Indonesia secara keseluruhan tampaknya masih jauh dari prinsip-prinsip demokratis (Wiratmaja, 2018: 91). Berdasarkan laporan *Democracy Index 2023: Age of Conflict* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia berada pada urutan ke 56 dari 167 negara dengan skor 6.53 dari 10. Skor ini membuat Indonesia masuk dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi tidak sempurna. Sebagai negara dengan demokrasi yang tidak sempurna, artinya Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek demokrasi meskipun telah melaksanakan pemilihan umum, misalnya pemerintahan yang carut-marut, budaya politik yang terbelakang serta partisipasi politik yang rendah (The Economist Intelligence Unit, 2024: 66). Dengan kata lain, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih berada pada level prosedural saja dan belum menyentuh level substansial. Kondisi demokrasi pada tataran nasional tersebut kurang lebih juga menjadi cerminan bagaimana kondisi demokrasi pada tataran terendah sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni di tingkat desa.

Demokrasi yang tidak sempurna telah menimbulkan suatu keadaan di mana pihak yang memilih maupun dipilih menunjukkan perilaku-perilaku irrasional selama proses pemilihan kepala desa berjalan. Berdasarkan Jati

(2022: 72), suatu pemilihan suara semestinya dijalankan dengan rasional, yakni menekankan independensi dan intelektualitas sebagai basis dalam menyikapi sesuatu. Perilaku irrasional dalam konteks pemilihan kepala desa mengacu pada tindakan yang lebih dominan didasari oleh emosi, pragmatisme sesaat, dan cara pandang lain yang tidak relevan dalam menilai calon pemimpin. Contoh perilaku irrasional tersebut misalnya adalah pengesampingan aspek kompetensi dan rekam jejak dalam menilai calon kepala desa, pewajaran strategi kampanye berbasis politik uang, serta pandangan sebelah mata terhadap perempuan yang terjun ke ranah politik (Rohman, 2016; Astuti & Marlina, 2022; Garis dkk., 2021).

Irrasionalitas yang mewarnai proses pemilihan kepala desa mencederai spirit egalitarian dan partisipatorisme dalam demokrasi substantif (Jati, 2022: 72). Spirit egalitarian menjunjung kesetaraan masyarakat dan menjamin masing-masing individu memiliki hak yang sama, termasuk hak politik. Sementara itu, partisipatorisme di sini tidak semata-mata merujuk pada partisipasi dalam bentuk pemberian suara yang sifatnya pasif, tetapi partisipasi yang aktif. Proses pemilihan kepala desa yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menempatkan individu semata-mata sebagai objek politik yang bisa dibeli suaranya menjadi suatu isyarat bahwa spirit demokrasi substansial belum sepenuhnya dihidupkan oleh masyarakat.

Praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala desa sudah menjadi suatu hal yang umum terjadi. Apabila dibandingkan dengan kontestasi politik di tingkat yang lebih atas, praktik pembelian suara atau *vote buying* bahkan

lebih banyak ditemukan pada pemilihan kepala desa (Aspinall & Rohman, 2017: 32). Sistem *one man one vote* dalam pemilihan kepala desa menjadikan persaingan antarkandidat menjadi semakin ketat, sehingga mendorong praktik ini sangat marak dilakukan oleh para kandidat calon kepala desa. Begitu maraknya, hingga masyarakat menganggapnya sebagai norma yang diwajibkan. Misalnya seperti yang ditemui di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana terdapat adagium berbunyi *ora uwik ora obos* yang berarti masyarakat hanya akan mencoblos (memberikan suara) apabila memperoleh imbalan materi dari calon atau tim sukses (Fitriyah, 2016: 109).

Selaras dengan konsep irrasionalitas yang sebelumnya disebutkan, sebagian masyarakat tidak melihat calon pemimpin berdasarkan kualitas, rekam jejak, maupun program kerja, melainkan berapa banyak materi yang dapat diberikan. Perilaku semacam ini merupakan salah satu ciri masyarakat dengan kultur politik parokial. Budaya parokial dicirikan oleh masyarakat dengan pemahaman politik yang terbatas, sehingga seringkali mereka tidak tahu mengapa mereka terlibat dalam kegiatan politik (Yusuf, 2016). Keterbatasan tersebut menjadikan suara individu dilihat sebagai komoditas yang diperuntukkan untuk kepentingan kemenangan saja, tanpa daya apa-apa dalam menentukan arah pemerintahan desa nantinya. Oleh karena itu, bagi calon kepala desa, strategi *vote buying* dianggap lebih praktis diterapkan bila melihat kondisi masyarakat yang demikian.

Kontestasi pemilihan kepala desa pada masyarakat dengan budaya parokial seakan menyiratkan bahwa hanya kalangan elit desa saja yang bisa

ikut serta berkompetisi. Sebab, untuk bisa masuk dalam arena persaingan modal sosial saja tidaklah cukup, sehingga memerlukan modal ekonomi yang besar pula. Bagi seorang perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, hal ini adalah mimpi buruk. Pasalnya, calon kepala desa perempuan tak hanya harus menghadapi kultur politik parokial saja, tetapi juga budaya patriarki. Meskipun secara umum partisipasi perempuan dalam politik di tingkat nasional maupun lokal telah mengalami peningkatan sejak pascareformasi, nyatanya hambatan untuk bisa menduduki posisi strategis dan menjadi pemimpin dalam suatu pemerintahan masih dialami oleh perempuan (Pravidjayanto, 2024). Perempuan harus menghadapi setidaknya tiga jenis hambatan, yakni hambatan dari individu, organisasi, dan sosial budaya (Idris, dkk., 2021). Ketiganya berakar kuat dari budaya patriarki yang androsentris dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia masih memelihara kultur patriarkal yang kuat hingga saat ini dan menyebabkan perempuan terus terpinggirkan dalam ruang-ruang politik.

Budaya patriarki meyakini bahwa peran perempuan ialah pada ranah domestik, sedangkan laki-laki dapat dengan leluasa menjajaki ranah publik (Sulastri, 2020). Inilah yang menyebabkan adanya dinding tak kasat mata yang menghalangi perempuan untuk bisa menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, seperti kepala desa. Sekalipun perempuan telah mampu menembus arena kompetisi pemilihan kepala desa, ia masih harus berhadapan dengan skeptisisme dan tekanan sosial dari

masyarakat (Mandasari & Septiani, 2024). Seringkali penilaian terhadap kandidat perempuan juga tidak didasarkan pada kualitas yang ada pada dirinya, melainkan justru didasarkan pada hal lain yang tidak relevan, misalnya bagaimana ia menjalankan peran sebagai ibu dan istri. Stereotip yang umumnya muncul adalah jika seorang perempuan tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya, maka sudah pasti ia tidak bisa memimpin desa.

Berkaitan dengan pemilihan kepala desa, modal sosial dan ekonomi yang kuat adalah kunci memenangkan kompetisi (Hanafie Haniah, 2021). Namun, pembatasan dari ranah publik secara natural menghambat perempuan untuk memupuk dua modal penting tersebut. Selain sempitnya ruang sosialisasi, tidak semua perempuan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang mandiri. Inilah mengapa kombinasi budaya parokial dan patriarki menjadi jalan terjal yang tidak semua perempuan mampu lewati dalam upaya mengikuti pencalonan kepala desa, terlebih hingga mampu keluar arena sebagai pemenang.

Berangkat dari problematika tersebut, rumah produksi Ravacana Films bekerja sama dengan MD Entertainment mengangkat konflik pemilihan kepala desa ke dalam sebuah karya audio visual berbentuk serial yang berjudul *Tilik the Series*. Dengan total delapan episode, *Tilik the Series* merangkum perjalanan tokoh Bu Tejo dalam pencalonan kepala desa serta strateginya menghalau berbagai taktik kotor dari sang lawan politik yang berniat menjatuhkannya. Serial ini menarik untuk dikaji karena memberikan sebuah

imajinasi akan situasi yang seringkali dianggap mustahil terjadi dalam sebuah pemilihan kepala desa, yakni kemenangan seorang calon dari kelompok gender marginal dengan program kerja terstruktur serta strategi politik yang bersih menembus hegemoni nilai-nilai patriarki dan budaya parokial. Semangat feminisme yang sarat muncul di sepanjang episode menjadikan tayangan serial ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berpotensi untuk mengedukasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menampilkan bagaimana upaya-upaya seorang perempuan untuk mendobrak kultur patriarkal-parokial yang melekat pada pelaksanaan kontestasi politik lokal hingga mampu meraih kemenangan.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana praktik demokrasi patriarkal-parokial pada pemilihan kepala desa direpresentasikan dalam *Tilik the Series*?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Teoretis

Tujuan teoretis dari penelitian adalah untuk menganalisis representasi demokrasi patriarkal-parokial pada kontestasi pemilihan kepala desa yang ditampilkan dalam sebuah karya audio visual berjudul *Tilik the Series* dengan menekankan sosok perempuan sebagai tokoh utama yang mampu mendobrak hegemoni budaya patriarki & parokial tersebut.

1.3.2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca maupun masyarakat umum bahwa pada kontestasi politik lokal khususnya pemilihan kepala desa tidak luput dari

adanya pengaruh budaya patriarki dan parokial. Melalui pengkajian kisah kemenangan yang diraih tokoh Bu Tejo menjadi kepala desa dalam media audio visual *Tilik the Series*, penelitian ini berusaha menunjukkan sejatinya hegemoni kedua budaya tersebut bukan mustahil untuk diruntuhkan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kajian ilmu politik dan pemerintahan, khususnya berkaitan dengan praktik demokrasi di tingkat desa yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal dan parokial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan analisis representasi fenomena pada sebuah cerita fiktif yang terinspirasi dari realitas kontestasi pemilihan kepala desa di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas serta menjadi dasar rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap dapat memperoleh pengalaman dan ilmu baru dalam menggali karya audio visual sebagai objek kajian ilmu politik dan pemerintahan. Selain itu, juga mendapatkan khazanah pengetahuan serta wawasan dari proses penelitian yang telah dijalankan sebelumnya.

1.4.3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat mengenai seperti apa realita pelaksanaan demokrasi di

tingkat desa yang tidak terhindarkan dari kungkungan budaya patriarkal-parokial dalam Tilik the Series. Selain itu, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman dan kesadaran khususnya bagi para perempuan bahwa selalu ada peluang untuk meruntuhkan kultur represif yang mengakar dalam kehidupan politik dan bernegara.

1.4.4. Kegunaan Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah saran maupun masukan bagi pemerintah untuk senantiasa melakukan penegakan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai demokrasi Indonesia yang substansial, hingga ke unit pemerintahan terendah yakni desa. Selanjutnya, peneliti berharap penggunaan media audio visual mampu menjadi inovasi dalam mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa yang linear dengan hukum dan berlandaskan spirit egalitarian serta partisipatoris.

1.5. Literatur Review

Budaya patriarki dan budaya parokial masih senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya yang telah mengakar tidak luput mempengaruhi keberjalanan aktivitas sosial-politik, termasuk dalam politik elektoral di tingkat desa yakni pemilihan kepala desa. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat cukup banyak riset yang mengkaji mengenai pengaruh eksistensi budaya patriarkal maupun parokial dalam pemilihan kepala desa. Pertama, budaya patriarki menyebabkan terjadinya diskriminasi gender. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Lalangon, Sumenep, di mana

jabatan kepala desa hanya diperkenankan untuk diisi oleh laki-laki, sebab masyarakat berpandangan bahwa jika perempuan memimpin ia hanya akan mengandalkan emosinya saja alih-alih menggunakan logika seperti laki-laki (Mawlana & Fauzi, 2021: 3). Kondisi tersebut menyebabkan laki-laki mendominasi pencalonan kepala desa dan hanya menyisakan sedikit bahkan hampir tidak ada ruang bagi perempuan untuk terpilih sebagai kepala desa.

Apabila perempuan berhasil terpilih sebagai kepala desa sekalipun, seringkali hal tersebut bukan didasari atas kompetensi, rekam jejak, maupun program kerja yang meyakinkan, tetapi karena adanya sosok orang lokal kuat (*local strongmen*) yang berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat untuk memilih dirinya (Wawan & Rosyid, 2023: 42). Besarnya pengaruh *local strongmen* di sini membuktikan bahwa perempuan masih berada dalam bayang laki-laki dan belum dipandang masyarakat sebagai seorang individu mandiri yang betul-betul layak dijadikan pemimpin. Hal ini selaras dengan argumen Alfiyani (2023: 182), yakni pemimpin perempuan cenderung dilihat dari hal-hal yang tidak relevan dengan konteks kepemimpinan maupun visi yang mereka tawarkan, misalnya siapakah pihak yang menyokong pencalonannya. Temuan-temuan tersebut semakin menguatkan anggapan bahwa calon pemimpin perempuan jarang sekali semata-mata dinilai berdasarkan kualitas yang ia miliki.

Berdampingan dengan budaya patriarki, budaya parokial tampaknya juga belum bisa dihilangkan. Budaya parokial salah satunya didasari dari orientasi politik dengan kalkulasi untung-rugi, artinya pertimbangan penentuan

pilihan pemimpin masyarakatnya ditentukan oleh jumlah bantuan yang didapat dari calon. Hal ini sebagaimana yang terjadi di kampung nelayan Majene, Sulawesi Barat, di mana calon yang memberikan banyak bantuan materi sangat diminati oleh masyarakat, hingga para nelayan rela tidak melaut demi memberikan suara untuk calon yang telah memberinya imbalan (Mansyur, 2019: 156). Strategi *vote buying* terus digunakan oleh para calon dari tahun ke tahun untuk meraih suara, bahkan mampu mendorong partisipasi masyarakat kampung nelayan Majene dalam memberikan hak pilihnya. Akan tetapi, tentu partisipasi masyarakat semacam ini tidak bisa dikatakan organik, dalam artian benar-benar berasal dari keinginan sendiri untuk menentukan pemimpin dan kebijakan terbaik. Hal yang mendasarinya adalah karena partisipasi yang terjadi lebih dimotivasi oleh dorongan material yang sifatnya jangka pendek. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Syuhada (2023: 212), masyarakat yang cenderung acuh terhadap terhadap sistem politik dan para pemimpin yang menghalalkan cara-cara instan alih-alih menggunakan strategi yang mencerdaskan para pemilih menjadi faktor pendorong mengapa budaya parokial masih hidup dan terus menggerus nilai-nilai demokrasi.

Perlu suatu upaya untuk memutus rantai budaya patriarkal-parokial khususnya dalam kehidupan politik di tingkat desa, misalnya melalui edukasi. Terkait edukasi tentang penyelenggaraan pemilu yang damai, pemerintah Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan upaya edukasi dengan menggunakan media audio visual film berjudul *Kejarlah Janji*. Anisa & Rifa (2024: 219) dalam risetnya yang mengkaji mengenai

pemanfaatan alat komunikasi visual oleh KPU sebagai strategi edukasi pemilih menjelaskan bahwa representasi pemilu dalam film *Kejarlah Janji* sejatinya membawa pesan bahwa para pemilih maupun calon pemimpin harus bersinergi mendorong terciptanya politik yang sehat agar terhindar dari konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti konflik, intimidasi, dan penyelewengan aturan selama proses pemilu berlangsung. Dengan memadukan narasi yang kuat serta simbol-simbol yang tepat, film ini berusaha mengedukasi warga negara untuk bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya.

KPU sebagai penyelenggara pemilu tampaknya mulai menyadari bahwa sosialisasi pemilu secara konvensional adalah strategi yang usang, sehingga mengkorporasikan pesan-pesan pemilu damai dalam balutan cerita fiksi melalui film kemudian diambil sebagai langkah pembaharuan dalam upaya mengedukasi pemilih. Hal ini selaras dengan temuan Fitri (2024: 13) dalam risetnya, yakni adanya kerja sama antara KPU di tingkat daerah dengan mahasiswa perfilman dalam mendorong pembuatan film pendek bermuatan pesan moral sebagai langkah penguatan edukasi politik di kalangan pelajar. Dengan begitu, bukan tidak mungkin film maupun bentuk karya audio visual lain yang memasukkan unsur nyata ke dalam cerita fiksi dikembangkan untuk menjadi suatu media edukasi bagi warga negara. Penggunaan media film tidak terbatas hanya pada pendidikan politik untuk pemilu saja, namun juga isu-isu yang tampak sepele tetapi sebetulnya sangat mengakar, misalnya budaya patriarkal-parokial pada politik di tingkat lokal.

Penggunaan film sebagai alternatif edukasi politik konvensional sebetulnya telah banyak menjadi pembahasan. Giroux (2011) dalam risetnya menjelaskan dengan baik mengenai peran film sebagai salah satu model pedagogi publik. Argumen utama dalam riset tersebut menyatakan bahwa film adalah jembatan bagi kemunduran pendidikan kewarganegaraan yang mampu menghubungkan politik, pengalaman pribadi, dan kehidupan masyarakat ke dalam sebuah isu sosial yang lebih besar (Giroux, 2011: 689). Giroux meyakini bahwa film menawarkan sebuah cara baru dalam mengkaji ulang pentingnya kultur politik dan pendidikan publik dengan memadukan dua perspektif, yakni menjadikan politik lebih edukatif dan pendidikan lebih politis. Dengan kata lain, film mendorong seseorang untuk berpikir lebih kritis dan memahami bahwa sebuah karya seni dapat berkontribusi ke dalam banyak hal, bukan hanya sebagai hiburan semata (Giroux, 2011: 693).

Berdasarkan berbagai literatur yang telah dipaparkan mengenai eksistensi budaya patriarkal-parokial pada politik di tingkat lokal, diketahui bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang tidak ideal. Upaya edukasi dan sosialisasi dengan pembaharuan strategi berupa penggunaan media karya audio visual film telah dilakukan untuk mewujudkan kehidupan politik yang damai. Sayangnya, hal tersebut belum bisa merangkum isu-isu yang lebih substantif, seperti bagaimana pemberian suatu kultur dapat menciptakan kondisi ketidakadilan yang sistematis bagi gender tertentu dalam menjalankan hak politiknya. Berkaitan dengan hal ini, *Tilik the Series* sebagai salah satu bentuk karya audio visual mengusung isu

perlawanan perempuan terhadap tekanan budaya patriarki-parokial dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana bentuk-bentuk budaya patriarkal-parokial pada demokrasi elektoral di tingkat desa serta upaya-upaya yang dilakukan perempuan untuk mendobraknya dalam *Tilik the Series*.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Demokrasi

Kajian mengenai demokrasi sejatinya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Meskipun begitu, pendefinisian tentang apa itu demokrasi sejatinya tidak pernah benar-benar menemui titik yang bisa disepakati oleh semua orang, sebab demokrasi memiliki sifat yang kompleks dan bermakna luas. Pengertian demokrasi seringkali merujuk pada pernyataan Abraham Lincoln dalam The Gettysburg Address tahun 1863, yaitu *government of the people, by the people, for the people* atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menempatkan kekuasaan rakyat pada posisi tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara, termasuk dalam menentukan keputusan atas masalah-masalah terkait kehidupannya serta memberikan penilaian terhadap kebijakan pemimpin negara (Prayitno & Prayugo, 2023: 4).

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik telah diadopsi di banyak negara karena dianggap sebagai sistem yang ideal untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan dalam hubungan sosiopolitik masyarakat, baik masyarakat dalam satu negara maupun antarnegara

(Nugroho, 2015: 2). Hingga tahun 2023 lalu sebanyak 74 negara telah masuk ke dalam kategori negara demokrasi, meskipun dalam pengimplementasiannya masing-masing negara tersebut memiliki kadar demokrasi yang berbeda-beda (The Economist Intelligence Unit, 2024: 3). Terdapat karakteristik yang membedakan suatu negara demokrasi dengan negara penganut sistem politik lainnya. Menurut Dahl, setidaknya terdapat dua dimensi yang membentuk sebuah negara demokrasi, yakni kebebasan dalam kontestasi publik dan hak untuk berpartisipasi bagi masyarakat dalam politik (Dahl, 1971: 5).

Adanya kontestasi dalam sistem demokrasi menandakan bahwa masing-masing pihak dapat memperoleh kekuasaan dengan upaya-upaya yang kompetitif untuk memenangkan suara rakyat melalui suatu pemilihan umum. Sementara itu, hak untuk berpartisipasi bagi rakyat menandakan bahwa terdapat unsur inklusivitas di mana semua elemen masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan berhak untuk ikut serta dalam menentukan arah kebijakan pemerintah (Dahl, 1998: 37). Hal ini memberikan penekanan bahwa masyarakat di sini tak hanya sekadar sebagai unsur rakyat (*demos*) saja, tetapi lebih dari itu ia memiliki kekuasaan untuk memerintah (*kratos*). Untuk menjalankan kekuasaan tersebut lah suatu pemilihan umum kemudian dilaksanakan untuk menyeleksi pemimpin yang akan mewakili masyarakat dalam memerintah, baik di tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil secara resmi telah diakui sebagai entitas yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan mengikuti kehendak dan kebutuhan masyarakatnya (Yuningsih & Subekti, 2016: 237). Untuk menyeleksi pemimpinnya, masyarakat desa juga melaksanakan sebuah pemilihan yang disebut dengan pemilihan kepala desa atau pilkades. Akan tetapi, pilkades sebagai perwujudan demokrasi di desa seringkali tidak dianggap memenuhi definisi demokrasi. Pandangan ini misalnya sebagaimana yang ditulis van der Kroef (1951: 185) dalam *Foreign Aid and Social Tradition in Indonesia*, bahwa desa-desa tradisional di Indonesia bukanlah merupakan demokrasi ataupun dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis sebagaimana yang diyakini dalam pemahaman barat.

Pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokrasi sejatinya dapat dianalisis menggunakan kriteria ideal demokrasi Robert Dahl. Dahl dalam bukunya *On Democracy* (1998: 37-38) mengemukakan bahwa terdapat setidaknya lima kriteria untuk menilai suatu proses demokrasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Effective participation* (partisipasi efektif), terdapat kesetaraan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi.
2. *Voting equality* (kesetaraan pilihan), terdapat kesempatan yang sama untuk memilih dan jaminan penilaian yang setara untuk masing-masing suara.

3. *Enlightened understanding* (pemahaman yang memadai), terdapat kesempatan untuk memperoleh pemahaman akan alternatif kebijakan yang ada berikut konsekuensi yang mungkin ditimbulkannya.
4. *Control of the agenda* (kontrol terhadap agenda), Terdapat kesempatan untuk menentukan masalah apa yang menjadi agenda.
5. *Inclusion of adults* (inklusif), tidak adanya pengecualian bagi semua orang dewasa yang sudah memiliki hak pilih.

Lima indikator tersebut penting digunakan dalam menilai apakah masing-masing individu dalam masyarakat memiliki kesetaraan politik yang sama (Dahl, 1998: 38). Adanya kesetaraan politik memberikan jaminan bahwa tidak ada pihak yang lebih berkuasa atas pihak lain, sehingga masing-masing individu berhak secara aktif berpartisipasi untuk menentukan keputusan politik terbaik secara mandiri sebagaimana yang diyakini dalam demokrasi. Dengan kata lain, suatu pemerintahan baru dapat dikatakan demokratis apabila proses demokrasi yang dijalankan memenuhi indikator-indikator yang telah disebutkan (Dahl, 1998: 40). Kelima indikator Dahl digunakan untuk menganalisis proses demokrasi dengan bentuk pemilihan kepala desa di Desa Karangwaru dalam *Tilik the Series*.

1.6.2. Feminisme

Untuk bisa mengetahui apa itu feminisme, seseorang terlebih dahulu harus memahami konsep patriarki. Patriarki merupakan sebuah

sistem sosial yang dikonstruksi secara struktural, di mana laki-laki mengontrol dan mendominasi masyarakat (Walby, 1989: 214). Sistem ini terus terpelihara dan dalam prosesnya melahirkan dominasi, opresi, dan eksploitasi terhadap perempuan. Feminisme hadir untuk meruntuhkan kondisi tersebut. Feminisme merupakan salah satu bentuk gerakan sosial, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meruntuhkan penindasan dan diskriminasi berbasis gender, serta mengadvokasi hak-hak perempuan di berbagai bidang (P. Bhandari, 2024: 1). Meskipun feminisme memiliki banyak aliran seperti feminisme liberal, eksistensialis, hingga radikal, pada dasarnya semuanya mengusung visi yang sama yaitu mendorong terciptanya pemberdayaan perempuan serta menentang sistem patriarkal yang membatasi pilihan dan kesempatan bagi perempuan. Sistem patriarkal telah menimbulkan konstruksi sosial akan gender yang dijadikan sebagai justifikasi untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat di bawah laki-laki. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex*, bahwa penempatan perempuan pada posisi inferior terhadap laki-laki dibentuk oleh masyarakat itu sendiri (de Beauvoir, 1956: 273). Berdasarkan hal tersebut, feminisme berupaya membawa spirit kesetaraan gender dan penolakan terhadap struktur kekuatan patriarkal yang menindas perempuan.

Gerakan feminisme bersifat dinamis, artinya ia memiliki variasi dan intensitas yang berbeda-beda akibat semakin kompleksnya

permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dari masa ke masa. Untuk memahami perkembangan feminisme, istilah *wave* atau gelombang digunakan untuk membagi periodisasi gerakan feminisme (McCann & Kim, 2002: 15). Sejak pertama kali muncul hingga saat ini, feminisme telah mengalami banyak perubahan besar yang dapat dibagi menjadi empat gelombang (P. Bhandari, 2024: 4). Gelombang pertama feminisme menekankan pada kesetaraan hak perempuan untuk bisa memilih (*right to vote*) dan memperjuangkan hak asasi dasar perempuan. Gelombang kedua feminisme (1960-1980) melebarkan fokus gerakan dan turut mengusung isu hak reproduksi, diskriminasi pekerjaan, dan kekerasan seksual. Sementara itu, gelombang feminisme ketiga (1990-2010) menekankan pada representasi dan inklusi perempuan, agensi individu dan pemberdayaan perempuan, serta menantang penindasan gender yang sistematis. Feminisme gelombang keempat kemudian muncul dan menekankan pada interseksionalitas dan advokasi isu berbasis digital, baik isu-isu perempuan maupun kelompok marginal lainnya.

Seiring dengan dengan perkembangannya feminisme telah mengangkat berbagai macam isu yang tidak hanya berdampak bagi kaum perempuan saja, tetapi juga masyarakat secara luas. Meski begitu, penindasan terhadap perempuan hingga saat ini belum sepenuhnya terhapuskan serta masih menjadi sebuah masalah yang terus dikaji oleh banyak disiplin ilmu, termasuk dalam Ilmu Politik. Feminisme dalam kajian Ilmu Politik telah mendorong berbagai pemikiran baru dalam

melihat ranah politik yang selama ini dianggap sebagai domain kaum laki-laki saja. Kajian feminisme atau kajian dengan perspektif feminisme dalam konteks sosial-politik berfokus menganalisis tentang kemangkiran dan ketidaknampakan perempuan di tengah dominasi politik yang maskulin serta lebih jauh lagi berupaya untuk mengubahnya (Budiman & Budiman, 2021: 103).

Feminisme diperlukan untuk menjelaskan bahwa minimnya partisipasi dan representasi perempuan dalam ranah politik sesungguhnya disebabkan oleh adanya diskriminasi berbasis gender serta relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki (Baylis, 2019: 12). Feminisme dalam hal ini berperan sebagai alat intelektual yang membantu para perempuan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa ia tertindas, bagaimana penindasan itu terjadi, dan apa yang bisa dilakukan untuk bisa terbebas dari penindasan yang ia alami. Oleh karena itu, feminisme dan politik menjadi dua hal yang memiliki titik relevansi karena salah satu fungsi dari feminisme adalah untuk menerangkan bagaimana politik yang efektif seharusnya berjalan. Hal ini sejalan dengan pendapat McCann & Kim (2002: 2), bahwa prinsip utama dari feminisme sebagai sebuah teori adalah bahwa ia harus bisa menjelaskan penindasan yang dihadapi oleh perempuan hingga selanjutnya mampu melahirkan strategi-strategi efektif untuk membawa perubahan. Dengan begitu, feminisme tidak hanya hidup sebagai konsep saja, tetapi juga dalam tindakan-tindakan yang nyata.

Penindasan yang dialami oleh perempuan sejatinya dapat digali lebih dalam lagi dengan menggunakan perspektif interseksionalitas. Interseksionalitas mengacu pada konsep yang pertama kali digunakan Crenshaw pada tahun 1989 untuk mengungkapkan diskriminasi berlapis yang dialami perempuan kulit hitam. Mengadopsi cara pandang interseksionalitas dalam teori feminisme memungkinkan seseorang untuk melihat bahwa penindasan terhadap perempuan sesungguhnya bersifat multidimensional (Crenshaw, 1989: 149). Crenshaw menganalogikan perempuan seolah berada di persimpangan jalan yang ramai oleh lalu-lalang kendaraan, artinya penindasan yang dialaminya datang dari berbagai penjuru. Seorang perempuan bisa saja mengalami penindasan oleh suaminya dalam rumah tangga, mendapatkan diskriminasi beban tugas di tempat kerja, hingga diolok-olok identitasnya oleh kawan-kawannya, sehingga penindasan tersebut bersumber dari banyak hal (Mustaqim, 2018: 72). Interseksionalitas juga memberikan penjelasan bahwa aspek di lingkungan sekitar perempuan berpengaruh dalam membentuk penindasan yang sistematis, misalnya aspek orang, stigma, hukum, dan kebijakan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan terciptanya konstruksi sosial yang memiliki kontribusi besar dalam penindasan terhadap perempuan (Crenshaw, 1991: 1244).

Feminisme sebagai sebuah gerakan, pemikiran, maupun pengetahuan sayangnya masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia karena dianggap tidak berakar pada budaya asli

Indonesia serta bersifat kebarat-baratan. Dewasa ini, banyak perempuan Indonesia yang tidak ragu menyebut dirinya sebagai feminis. Meskipun begitu, pelabelan diri sebagai seorang “feminis” tampaknya masih terasa asing bagi banyak perempuan di Indonesia, tak terkecuali perempuan dari kalangan aktivis dan akademisi-peneliti (Arivia & Subono, 2017: 6). Padahal, pada kenyataannya banyak aktivitas politik serta diskusi yang mereka lakukan sejalan dengan cita-cita dari feminisme itu sendiri.

Arivia & Subono (2017) dalam *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia* memberikan uraian panjang mengenai sejarah aktivitas politik perempuan di Indonesia sejak era kolonial yang sarat dengan spirit feminisme sebagai inti gerakan. Hal ini misalnya terlihat dari perjuangan pahlawan perempuan seperti R. A. Kartini dan Rohana Kudus, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di masa Orde Lama, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan aksi Suara Ibu Peduli (SIP) di masa Orde Baru, serta Yayasan Kalyanamitra di era Reformasi. Keinginan untuk menghapuskan penindasan terhadap perempuan dan membuat kaum perempuan berdaya telah mendorong para perempuan Indonesia untuk melakukan aksi-aksi politik. Hal ini membuktikan bahwa meskipun gerakan perempuan tidak menggunakan label feminis, sesungguhnya ide-ide dan cita-cita dari feminisme telah lama hidup dalam perjuangan perempuan-perempuan Indonesia.

Keengganan dalam menggunakan istilah feminisme maupun label feminis sejatinya dapat “dikesampingkan” selagi aktivitas yang dilakukan

masih sejalan dengan koridor pemikiran feminisme. Blackburn (2004: 14) menjelaskan bahwa setiap gagasan atau individu yang menunjukkan komitmen untuk menghapuskan atau menekan diskriminasi terhadap perempuan dapat disebut sebagai feminisme. Pemahaman ini tecermin pada tokoh Bu Tejo dalam *Tilik the Series*. Seseorang tidak perlu melabel dirinya sebagai feminis untuk bisa mengatakan bahwa tindakan-tindakan yang ia lakukan adalah perwujudan dari feminisme. Begitu pula dengan Bu Tejo yang tidak menyebut dirinya seorang feminis maupun menggunakan istilah feminisme dalam upaya mendobrak budaya patriarki di Desa Karangwaru selama proses pencalonannya sebagai kepala desa.

1.6.3. Budaya Politik Parokial

Budaya politik atau *political culture* didefinisikan sebagai orientasi sikap warga negara yang khas terhadap sistem politik, bagian-bagiannya, serta perannya sebagai warga negara yang terinternalisasi dalam bentuk pemahaman, perasaan, dan evaluasi (Almond & Verba, 1963: 13-14). Teori budaya politik dikembangkan untuk menjembatani pendekatan behavioral dengan Ilmu Politik dalam rangka memberikan interpretasi atas tindakan politik yang dilakukan seseorang. Melalui buku *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* (1963), Almond & Verba menjelaskan bahwa teori budaya politik memadukan pendekatan antropologi, sosiologi, dan psikologi untuk menguraikan orientasi warga negara dalam sebuah sistem politik. Hal ini senada dengan pendapat Pye, dkk. (1965: 8) bahwa menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu

untuk melihat kecenderungan orientasi perilaku individu akan memperkaya analisis terhadap dinamika politik yang terjadi di masyarakat.

Orientasi perilaku seseorang dalam sebuah sistem politik diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif (Almond & Verba, 1963: 15). Orientasi kognitif merupakan pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap sistem politik, peran, kewajiban, input atau tuntutan masyarakat, serta output atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Orientasi afektif yakni perasaan masyarakat terhadap sistem politik, aktor di dalamnya, serta kinerjanya. Sementara itu, orientasi evaluatif adalah penilaian dan pendapat masyarakat terhadap objek-objek politik yang umumnya merupakan kombinasi dari standar nilai dan kriteria yang berkembang di masyarakat dengan disertai informasi dan perasaan. Budaya politik terbentuk dari frekuensi orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif yang berbeda-beda terhadap sistem politik secara umum, input dan output kebijakan, serta peran diri sendiri sebagai aktor politik (Almond & Verba, 1963: 17).

Budaya politik terbagi menjadi tiga, yaitu budaya politik parokial, subjek, dan budaya politik partisipatif. Budaya politik parokial adalah manakala frekuensi ketiga orientasi, baik kognitif, afektif, maupun evaluatif hampir atau sama sekali tidak muncul di masyarakat (Almond & Verba, 1963: 17). Masyarakat yang memiliki budaya politik parokial umumnya tidak memiliki orientasi politik atau hanya berhenti pada

orientasi kognitif. Artinya, masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit pengetahuan terhadap sistem politik secara umum, proses pembuatan kebijakan, dampak dari kebijakan, dan perannya sebagai seorang warga negara. Terbatasnya pengetahuan membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa sesungguhnya keadaan dapat diubah menjadi lebih baik melalui sistem politik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak banyak menuntut perubahan dan bisa dikatakan tidak mengharapkan apa-apa dari sistem politik itu sendiri (Almond & Verba, 1963: 18). Berbeda dengan budaya politik parokial, masyarakat dengan budaya politik subjek telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik beserta output kebijakannya, meski partisipasinya masih bersifat pasif. Sementara itu, pada budaya politik partisipatif masyarakat tak hanya memiliki pengetahuan yang baik mengenai sistem politik dan peran pemerintah, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses politik serta mampu memberikan respon terhadap objek-objek politik termasuk dalam bentuk kritik (Almond & Verba, 1963: 19).

Syuhada (2023: 212) menjelaskan karakteristik dari masyarakat dengan budaya politik parokial, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi politik yang rendah. Partisipasi politik di sini merujuk pada partisipasi aktif yang tidak terbatas hanya pada keikutsertaan dalam proses pemungutan suara, tetapi juga partisipasi yang bersifat evaluatif.

2. Tidak ada peran politik khusus yang dimiliki oleh masyarakat. Ketidadaan di sini mengacu pada pemisahan peran politik yang tidak jelas sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, misalnya kepala desa yang merangkap menjadi tokoh agama.
3. Tidak ada minat terhadap sistem politik. Masyarakat budaya politik parokial umumnya menganggap bahwa politik bersifat normatif dan tidak memiliki konsekuensi signifikan untuk kehidupan mereka, sehingga masyarakat pun tidak terlalu menganggap politik suatu hal yang penting.
4. Pengetahuan politik yang rendah. Karakteristik yang paling menonjol dari budaya politik parokial adalah rendahnya level kognitif atau pemahaman mengenai sistem politik. Pengetahuan politik yang terbatas mengakibatkan munculnya karakteristik pada poin pertama hingga ketiga.

Tipe masyarakat dengan budaya politik parokial murni disebut relatif sulit ditemukan (Haryanto, 2018: 45). Argumen ini sebagaimana yang telah diungkapkan Almond & Verba (1963: 20) bahwa sejatinya masing-masing budaya politik telah saling bercampur, sehingga tidak benar-benar ada budaya politik yang murni, termasuk budaya politik parokial. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pada kehidupan demokrasi modern saat ini indikasi budaya politik parokial masih eksis pada sebagian masyarakat, sehingga memunculkan hambatan bagi proses demokrasi itu sendiri. Menurut Syuhada (2023: 206), keberadaan budaya

politik parokial di Indonesia tidak lain disebabkan oleh kegagalan para pemimpin dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang menjunjung keterwakilan serta partisipasi publik, sebagaimana yang disyaratkan demokrasi. Malfungsi ini menimbulkan terjadinya suatu diskoneksi antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili berupa timbulnya rasa kecewa dan tidak percaya sebab kepentingan rakyat seringkali tidak lebih penting daripada kepentingan pribadi para wakilnya (*vested interest*). Akhirnya, muncul pandangan bahwa berpartisipasi dalam segala hal yang berbau politik merupakan kesia-siaan, sebab siapapun yang memegang kendali pemerintahan nyatanya tidak pernah benar-benar bisa memperbaiki kondisi hidup rakyat. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap politik di satu sisi juga dipengaruhi oleh pemerintah itu sendiri.

Almond & Verba (1963) meyakini pengetahuan akan sistem politik adalah hal mendasar yang harus terlebih dahulu dimiliki oleh seseorang agar dapat berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Problematika yang dimiliki oleh masyarakat berbudaya politik parokial adalah bahwa pengetahuan tersebut amatlah terbatas hingga di titik mereka tidak mengetahui dampak dari ketidaktahuan tersebut. Ketidaktahuan inilah yang seringkali justru dimanfaatkan oleh para calon pemimpin maupun pemimpin terpilih untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya, termasuk dengan cara-cara yang mencederai demokrasi. Haryanto (2018: 76) berpendapat bahwa pemberian wawasan politik kepada warga negara

dapat membentuk, mempertahankan, dan mengubah kultur politik yang telah ada. Artinya, budaya politik parokial sesungguhnya tidak bersifat permanen dan sangat mungkin untuk diubah apabila para pemimpin dan calon pemimpin berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang sadar politik dan memperbaiki iklim demokrasi menjadi lebih substantif.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Demokrasi patriarkal-parokial mengacu pada suatu sistem demokrasi yang masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya patriarki dan budaya politik yang parokial. Eksistensi kedua budaya tersebut menjadi sebuah kontradiksi bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang menjunjung prinsip egalitarian dan partisipatif. Kultur patriarki menempatkan laki-laki sebagai gender yang superior terhadap gender lainnya, sedangkan budaya politik parokial secara tidak langsung memelihara sifat pasif masyarakat dalam demokrasi. Demokrasi patriarkal-parokial dengan begitu sejatinya adalah ancaman bagi demokrasi itu sendiri, sebab ia tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang aktif dalam politik dan justru merawat hierarki gender yang ada.

Penggunaan konsep demokrasi patriarkal-parokial pada penelitian ini dimaksudkan agar dapat melihat demokrasi berwujud pilkades di tengah-tengah budaya patriarki dan budaya politik parokial sebagai sebuah jaringan yang saling berkaitan. Ketiganya tidak dapat dijelaskan secara terpisah sebab saling berkelindan dan terhubung. Pada akhirnya, penggunaan konsep demokrasi patriarkal-parokial membawa pada dua kemungkinan kesimpulan,

apakah representasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam *Tilik the Series* mencerminkan demokrasi yang ideal atau justru kontraproduktif dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce, yaitu menggunakan relasi triadik atau dikenal pula dengan segitiga makna (*triangle of meaning*). Metode segitiga makna menekankan pada analisis makna menggunakan tiga unsur, yakni *sign/representament* (tanda), *object* (objek), dan *interpretant* (interpretasi) (Peirce, 1991: 7). *Representament* merupakan bentuk fisik dari tanda yang dapat berwujud kata-kata, gambar, simbol, atau wujud lain yang mewakili suatu konsep. Sebaliknya, *object* merupakan konsep, fenomena, maupun entitas yang diwakili oleh *representament*. Kemudian, *interpretant* adalah penafsiran yang dimunculkan dari pemahaman penerima tanda. *Interpretant* menjadi unsur penting pada semiotika Peirce karena berperan dalam memberikan makna pada tanda dengan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penerima tanda atau pesan (Peirce, 1991: 8). Hal ini berkaitan dengan asumsi dasar dari semiotika itu sendiri, di mana setiap orang dapat memiliki pemaknaan yang berbeda-beda akan tanda, tergantung dari budaya, ideologi, maupun latar belakang lain yang dimiliki (Bambang & Nur, 2013: 75). Oleh karena itu, inti dari semiotika Peirce adalah untuk

memberikan analisis tentang bagaimana tanda-tanda tersebut diproduksi, dipahami (Sjoraida, dkk., 2024: 1266).

Penggunaan semiotika Peirce berguna untuk mendekonstruksi dan meinterpretasi adegan dan dialog dalam *Tilik the Series* dengan tujuan mengetahui pesan atau makna yang berusaha disampaikan. Seluruh episode *Tilik the Series* diobservasi guna menemukan tanda-tanda secara tematik, yakni yang berkaitan dengan bentuk-bentuk budaya patriarkal-parokial serta tindakan feminisme. Tanda-tanda yang diperoleh diuraikan maknanya melalui metode *triangle of meaning* (*representament*, *object*, *interpretant*) untuk kemudian dijelaskan secara lebih dalam menggunakan teori-teori terkait, yaitu teori demokrasi, feminisme, dan budaya politik parokial.

1.8.2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini ialah tayangan *Tilik the Series* yang terdiri atas delapan episode. *Tilik the Series* merupakan serial yang diproduksi oleh MD Entertainment dan Ravacana Films dan diakses secara resmi melalui *platform* layanan video WeTV. Secara spesifik, objek penelitian yang menjadi bahan analisis adalah adegan maupun dialog yang berkaitan dengan tema budaya patriarkal-parokial, demokrasi, dan feminisme.

1.8.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan angka atau nominal. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa tayangan video yang berisikan adegan-adegan dalam *Tilik the Series*. Melalui tayangan seluruh episode *Tilik the Series*, peneliti memilah adegan dan dialog yang memuat tema-tema berkaitan dengan fokus penelitian ini, yakni budaya patriarkal-parokial serta feminisme dalam demokrasi di tingkat desa.

b. Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur, media, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang dijadikan sasaran penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan, di mana observasi tidak dilakukan melalui keterlibatan secara langsung dengan objek yang diobservasi. Observasi non-partisipan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyaksikan tayangan *Tilik the Series* yang berjumlah delapan episode.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed dalam Supriyadi, 2017: 3). Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan informasi yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya yang berisikan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama tahap reduksi data, yaitu meliputi merangkum dan memilih bagian-bagian cerita dari *Tilik the Series* bermuatan tanda-tanda visual yang berkaitan dengan topik penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Tahap ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dan menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kedua, tanda-tanda visual yang telah diidentifikasi dalam adegan maupun dialog diinterpretasi menggunakan metode semiotika *Peirce* atau segitiga makna (*triangle of meaning*). Tahapan ini tidak sekadar bertujuan untuk menguraikan isi adegan atau dialog, tetapi juga menyertakan konteks sosial-budaya dalam menginterpretasikannya. Tahapan ini didukung dengan tahapan ketiga, yaitu analisis yang mendalam dengan berlandaskan teori-teori maupun konsep-konsep untuk memperkaya hasil temuan penelitian. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.